

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Cetakan ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Press
- B. Simanjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi social*, Tarsino, Bandung
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, NN, hal. 107-108
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajawali Press
- Edward O.S. Hiariej, 2012, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Pelaku
- Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana. Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung
- I. P. M. Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika

- J. Danang Widoyoko, 2013, *OLIGARKI DAN KORUPSI POLITIK INDONESIA Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik*, Malang, Intrans Publishing
- Jay S. Albanese, 2016, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*, Jakarta, Prenadamedia group
- Jhon. M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika
- Mudzakir, 2008, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, Jakarta, BPHN
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, PMN
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Jakarta: UI Press
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Wjs Poerwadarminta, 1961, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Jurnal, & Makalah

Abdul Haris Semendawai, “*Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia*”, Makalah ini disampaikan dalam International Workshop on The Protection of Whistle Blower as Justice Collaborator yang diselenggarakan oleh LPSK bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Jakarta, 19-20 Juli 2011

Jurnal Ilmiah Hukum, 2005, *Legality*, Vol. 13 No. 2, FH UMM, Malang

Lilik Mulyadi, “*Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 – No 3 Tahun 2014

Marie-Aude Beernaert, “*‘Repentis’ et ‘collaborateurs de justice’ : quelle legitime dans le systeme penal?*”. *Droit et societe*. (2003/3-no 55)

Nixson dkk, “*Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, *USU Law Journal* Vol. II-No.2 (Nov 2013), Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara

River Yohanes Manalu, “*Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*” *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 (Januari 2015)

Saristha Natalia Tuage, “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*”, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013 (April 2013)

Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 Tentang Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor ; KEPB-02/01-55/12/2011, NOMOR : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

United Nations Office on Drugs and Crime, 2008, *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime*, New York, United Nations

Skripsi & Tesis

Aditya Wisnu Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi*, Tesis, Program Pascasarjana, Denpasar: Universitas Udayana

Maria Yudithia Bayu Hapsari, 2012, *Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Sigit Artantojati, 2010, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Program Pascasarjana, Jakarta: Universitas Indonesia

Publikasi Pemerintah

Laporan Tahunan LPSK 2011, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta), 2012

Laporan Tahunan LPSK 2012, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta), Februari 2013

Laporan Tahunan LPSK 2013, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta), 2014

Laporan Tahunan LPSK 2014, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta), Desember 2014

Laporan Tahunan LPSK 2015, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta), 2016

Internet

Diakses melalui http://themoonstr.blogspot.com/2013/01/whistleblower-dan-justice-collaborator_24.html, pada tanggal 15 februari 2017(02:49)

Diunduh melalui

[file:///f:/file%20skripsi/berita/maksimalkan%20perlindungan%20terhadap%](file:///f:/file%20skripsi/berita/maksimalkan%20perlindungan%20terhadap%20)

20justice%20collaborator,%20lpsk%20kerja%20sama%20dengan%20ditjen%20pas%20kemenkumha%20-.htm, pada tanggal 1 Februari 2017 (12:14)

Diunduh melalui <http://linggadataku.blogspot.co.id/2011/05/skripsi-hukum.html>, pada tanggal 14 Januari 2017 (22:05)

Diunduh melalui http://lpsk.go.id/berita/berita_detail/2308, (1 Januari 2017, 12:56)

Diunduh melalui

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>, pada tanggal 21 Januari 2017 (21:46)

Diunduh melalui http://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/330, pada tanggal 25 Januari 2017 (20:40)

Diunduh melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Grasi>, pada tanggal 3 Januari 2017 (18:50)

Diunduh melalui

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban, (26 November 2016, 13:52)

Diunduh melalui <https://misterluthfi.corner.web.id/pengertian-dan-definisi-korupsi/>, (12 Januari 2017, 22:50)

Justitia Avila Veda, *Penerapan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, 26 November 2016,

<http://www.lk2fhui.com/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/> (14:52)

Komisi Pemberantasan Korupsi, Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi 2008-2011, diunduh melalui

https://www.kpk.go.id/images/pdf/Rencana%20Strategis/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, (12 Januari 2017, 23:51)

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses melalui

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>,

pada tanggal 8 Januari 2017 (12:10)

Surabayapostonline.com, *Komnas HAM Dukung LPSK: Kesaksian Kasus*

Cebongan Lewat Teleconference, diunduh melalui

http://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/1033#sthash.LmmqFbYx.dpuf

(10 Januari 2017, 10:09)